

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkrasi antara negara yang berdaulat (Hadiwijoyo, 2018). Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 96% laut. Lalu lintas perdagangan dunia. Luas Provinsi Kepulauan Riau adalah 251.810 km. Di mana 96% di antaranya adalah lautan yang dihubungkan oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Pusat kegiatan provinsi Kepulauan Riau dapat dicapai dari Singapura dalam waktu sekitar 1-2 jam melalui jalur laut. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam (Akhirman, 2020).

Dengan strategisnya dan kaya akan sumber laut di Kepulauan Riau, hal ini membuat banyaknya terjadi permasalahan di perairan Kepulauan Riau. Ada banyak peristiwa yang terjadi mulai dari *illegal fishing*, kecelakaan laut, penyeludupan tanpa izin dan lain sebagainya. Di Kepulauan Riau dengan kekayaan hasil lautnya sering kali terjadi *illegal fishing* di kawasan perairan Kepulauan Riau. Kerugian negara yang diakibatkan dari *illegal fishing* berjumlah 30 Triliun pertahun, dan 10% dari kerugian tersebut berasal dari perairan Kepulauan Riau. Tidak hanya itu, ada beberapa kasus kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Kepulauan Riau terutama yang berbendera Vietnam. Dan selain mencuri ikan, nelayan tersebut juga melakukan penyelupan benih-benih lobster. Dengan menggunakan tiga kapal *speedboat* yang membawa 300 ribu benih lobster yang ke negara Singapura.

Tidak hanya itu ada juga permasalahan di perairan Kepulauan Riau tepatnya di perairan Natuna. Permasalahan itu ialah Negara China yang mengklaim sebagian wilayah perairan Natuna. Dan yang sebenarnya kawasan tersebut merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Permasalahan sengketa di perairan Natuna dengan negara China merupakan peristiwa yang sudah berulang kali terjadi. Dan pada tahun 2021 China membuat ulah kembali di perairan Natuna yaitu dengan masuknya kapal perang China ke daerah perairan Natuna yang berhadapan langsung dengan nelayan tradisional Natuna. Dan hal itu membuat pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan melakukan patroli rutin di sekitar perairan Natuna, guna mengantisipasi kapal perang China kembali datang. Di kawasan perairan Natuna merupakan daerah yang memiliki kekayaan laut yang melimpah sehingga banyak negara asing yang ingin mencuri hasil kekayaan laut Natuna bahkan ingin menguasai atau mengklaim daerah perairan Natuna.

Dengan banyaknya terjadi permasalahan di kawasan perairan Indonesia terutama Kepulauan Riau yang sebagian besarnya daerah perairan, maka pada tahun 2014 dibentuk Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) oleh Pemerintah Indonesia. BAKAMLA ini merupakan Lembaga nonkementerian. BAKAMLA ini sendiri dibentuk dengan dengan fungsi dan tugas utamanya adalah mengawasi dan melindungi kawasan perairan Indonesia.

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) berdasarkan Pasal 59 (3) UU Kelautan sebagai bagian dari penegakan hukum di perairan Indonesia dan di bawah yurisdiksi Indonesia, khususnya patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan di bawah yurisdiksi Indonesia. BAKAMLA merupakan badan nonkementerian

yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, yang dikoordinasikan oleh menteri Koordinator. Selain diperkenalkan dalam UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan, tugas dan fungsi BAKAMLA secara jelas juga dituliskan dalam Perpres 178 tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut (Adiprayoga et al., 2020).

BAKAMLA adalah sebuah lembaga yang bertugas menjaga keamanan di perairan Indonesia dan kemudian mengukuhkan kehadirannya dalam hubungan internasional, BAKAMLA menggunakan nama *Indonesian Coast Guard (ICG)* (Azis et al., 2021).

BAKAMLA juga tidak sendiri dalam mengawasi perairan Indonesia. BAKAMLA sendiri sudah sering bekerjasama dengan instansi yang bertugas dalam menangani perairan. Yaitu ada TNI-AI, Polairud, Bea Cukai, Imigrasi dan instansi sejenisnya. Dengan dijalinnya kerjasama dengan instansi lain tentu memudahkan BAKAMLA sendiri dalam melakukan tugas dan fungsinya. Tidak hanya dalam melakukan patroli, kerjasama BAKAMLA dengan instansi terkait juga melakukan pelatihan bersama, diskusi permasalahan perairan, saling bertukar informasi dan sebagainya. Dan tidak hanya instansi dalam negeri saja, BAKAMLA juga melakukan kerjasama antar negara, salah satu contohnya ialah kerjasama BAKAMLA dengan *Vietnam Coast Guard* dalam rangka kerjasama keamanan dan keselamatan maritim. Kerjasama ini dilakukan pada akhir tahun 2021 yang diselenggarakan di dua tempat yaitu Mabes *Vietnam Coast Guard* dan Mabes BAKAMLA RI.

Membangun armada keamanan di kawasan perairan yang kuat adalah salah satu faktor penting dalam mencapai tata kelola maritim yang optimal. *Coast Guard* adalah lembaga yang mengawasi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di laut dan di pesisir, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang secara teknis dan operasional dipenuhi oleh Menteri. Penjagaan dan pengawasan kawasan perairan dapat bertindak sebagai fungsi pemersatu dan koordinasi badan keamanan lainnya dan memperluas area pengawasan ke objek dengan ruang pengawasan terbatas. Di beberapa negara dengan visi maritim, *Coast Guard* telah dipilih sebagai konsep keamanan “*sweep the universe*”. *Coast Guard* memiliki banyak tanggung jawab sebagai badan keamanan maritim yang dan mampu menjalankan dan menyelesaikan misi di laut lepas. UNCLOS, dipahami bahwa ada dua lembaga di ranah maritim yang memiliki fungsi dan tugas yang sama. Peraturan Pemerintah ini sangat menguatkan peran BAKAMLA dalam pengawasan perairan di Indonesia dan menjadi BAKAMLA instansi terdepan dalam melakukan pengawas di daerah perairan. Di Indonesia sendiri terkhususnya Kepulauan Riau banyak terjadi permasalahan perairan yang di tangani langsung kasusya oleh BAKAMLA. Menurut data yang penulis dapatkan dari instansi Bakamla.

Untuk mencapai keamanan wilayah Indonesia dan niat untuk membangun Indonesia di poros maritim dunia. Maka Indonesia membentuk BAKAMLA. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia disingkat BAKAMLA-RI. BAKAMLA adalah badan keamanan dan keselamatan militer negara yang bertugas melakukan patroli di perairan Indonesia dan di wilayah laut Indonesia. BAKAMLA adalah lembaga

pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan. Sebelumnya BAKAMLA merupakan lembaga nonstruktural bernama Badan Koordinasi Keselamatan Maritim Republik Indonesia disingkat BAKORKAMLA-RI. Badan Keselamatan Maritim. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur tugas dan peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI dan koordinasi antar instansi yang memiliki fungsi serupa dalam rangka penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakkan di wilayah perairan Indonesia (Alfayed & Setiawan, 2022).

BAKAMLA Zona Maritim Barat berpusat di Kota Batam yang kantornya berada di Jalan RE Martadinata, Tanjung Pinggir, Kota Batam.

Gambar 1. 1 Kantor Bakamla Zona Maritim Barat



Sumber: Bidang Umum Kantor Bakamla Zona Maritim Barat

Zona Maritim Barat terdiri dari 3 bidang yaitu bidang umum di kepalai Kolonel Djoko Prasetyo,A.Md. bidang informasi, hukum dan kerjasama (INHUKER) di kepalai oleh Kolonel Bakamla Budi Elyas,A.Md dan bidang operasi (OPS) di kepalai oleh Kol. Djoko Wahyu Utomo, SE.,M.J. Dan dikepalai oleh kepala kantor BAKAMLA Zona Maritim Barat yaitu Laksma BAKAMLA Hadi Pranoto,S.Sos.,M.Si.

BAKAMLA Zona Maritim Barat mencatat pada bulan Januari – April 2022 ada beberapa kasus kejadian dan kecelakaan. Di antaranya ada kasus pengamanan 52 tenaga kerja asing tanpa dokumen resmi yang berlayar menggunakan kapal motor (KM) dari Tanjung Balai (Indonesia) menuju Malaysia. 52 orang itu terdiri dari 34 Laki-laki, 17 perempuan dan 1 balita. Dan ada juga penangkapan 3 kapal ikan berbendera Vietnam di Natuna yang bekerjasama dengan TNI AL. Ada juga beberapa kecelakaan laut yang ditangani langsung oleh BAKAMLA. Terhitung dari bulan Januari sampai April 2022 terdapat 37 kasus kecelakaan laut di daerah Kepulauan Riau. Kasus kecelakaan laut di dominasi oleh kecelakaan kapal dan hilangnya nelayan. Jadi BAKAMLA ini sangat berperan penting dalam pengawasan dan keamanan perairan Indonesia khususnya Kepulauan Riau.

Dalam hal ini BAKAMLA telah melaksanakan tugas pokoknya yang tercantum dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan pasal 61 tugas pokok yang berbunyi “melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Di dalam melakukan tugasnya dalam pengamanan dan pengawasan BAKAMLA RI Zona Maritim Barat memiliki mekanisme kerja. Mekanisme kerjanya tersebut ada 5 poin yaitu *collecting*,

displaying, corellating, analyzing, disseminating. Bakamla RI Zona Maritim Barat juga melakukan kerjasama atau *sharing information* dengan *stakeholder* maritim lainnya untuk memantau situasi kelautan dan melaksanakan analisis dalam rangka membangun *maritime picture* sehingga tercipta *maritime awarenes* yang menghasilkan deteksi dini untuk selanjutnya mendorong terciptanya *collaborative response*.

BAKAMLA-RI Zona Maritim Barat juga memiliki sistem pemantauan yang memudahkan dan melancarkan BAKAMLA untuk mengawasi kawasan perairan. Sistem pemantau BAKAMLA terdiri dari dua bagian yaitu *closed source* dan *open source*. *Closed source* terdiri dari *vessel scrutiny* (pemantauan dan *tracking* kapal berdasarkan data AIS). Sedangkan *open source* terdiri dari empat sistem yaitu *vessel finder* (pemantauan kapal berdasarkan data AIS), *fleetmon* (pemantauan kapal berdasarkan data AIS), *vessellink* (pemantauan kapal berdasarkan data AIS), *marine traffic* (pemantauan kapal berdasarkan data AIS). Dalam melakukan tugas dan rutinitas harian, BAKAMLA memiliki produk harian puskodal. Diantaranya adalah laporan cuaca yang meliputi tinggi gelombang dan prediksi angin yang didapat dari sumber BMKG, laporan kejadian maritim yang di dapatkan dari sumber *open source* (media online), laporan posisi unsur kapal BAKAMLA yang didapat dari Dit (operasi laut BAKAMLA). BAKAMLA sendiri dalam melakukan pengawasan di daerah perairan Kepulauan Riau, BAKAMLA menyiapkan pangkalan disetiap titik vital di kawasan perairan Kepulauan Riau. Seperti di Batam, Tanjung Balai Karimun sampai ke Natuna.

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini jika dilihat dari latar belakang diatas maka, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Peran BAKAMLA dalam Melakukan Pengawasan di Kawasan Perairan Kepulauan Riau Tahun 2022?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana peran BAKAMLA dalam melakukan pengawasan di perairan Kepulauan Riau tahun 2022 terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di perairan Kepulauan Riau. Berdasarkan dari rumusan masalah pokok diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu untuk mengetahui peran BAKAMLA terhadap pengawasan di perairan Kepulauan Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang “Peran Badan Keamanan Laut dalam melakukan pengawasan di kawasan perairan Kepulauan Riau Tahun 2022” ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta mengembangkan ilmu pemerintahan

khususnya tentang peran penting BAKAMLA dalam melakukan pengawasan di perairan Kepulauan Riau.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh BAKAMLA sebagai pengawasan dalam melakukan tugas harian dan khusus di perairan Kepulauan Riau.

